VISI GLOBAL AGRIBISNIS BERKELANJUTAN: Antisipasi Jangka Panjang Terhadap Krisis Ekonomi

Oleh:Dr. Ir. E. Gumbira-Sa'id , MADev [1] dan Ir. M. Zahrul Muttaqin, MM[2]

[1] Direktur Akademik MMA-IPB dan
Direktur Eksekutif Majelis Usahawan Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (MUIPB).
[2] Sekretaris Eksekutif MUIPB

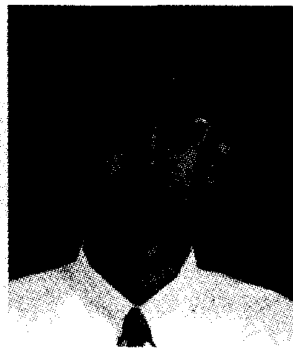

Dengan disepakatinya perdagangan bebas di hampir seluruh wilayah di dunia pada tahun 2020 mendatang, maka persoalan pertanian menjadi sangat penting untuk dicermati, mengingat pada sektor inilah tempat sebagian besar negara-negara berkembang bergantung. Sektor pertanian tanaman pangan, pada khususnya, masih akan merupakan bisnis yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dimana ada peradaban, di situ pula bisnis pertanian (agribisnis) diperlukan. Selama 25 tahun terakhir, agribisnis dunia telah berhasil meningkatkan produksi pangan lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Hal ini diduga dapat berlanjut untuk 25 tahun ke depan bahkan lebih, jika dilakukan tindakan yang tepat. Namun dalam kenyataannya, saat ini sektor agribisnis masih tetap memberikan sisi suram pada ketersediaan dan aksesibiltas sebagian penduduk dunia terhadap pangan. Saat ini sekitar 800 juta orang di dunia tidak mendapatkan makanan yang cukup, sedangkan sekitar 185 juta anak prasekolah mengalami malnutrisi dan sekitar 40.000 anak meninggal dunia setiap harinya karena penyakit yang berkaitan dengan gizi (Pinstrup-Andersen & Pandya-Lorch, 1998). Kekurangan pangan, kondisi kehidupan yang tidak sehat, dan kemiskinan di beberapa negara berkembang merupakan ancaman global saat ini. Kegagalan untuk menjamin keamanan pangan yang berkelanjutan akan membawa pada kondisi ketidakstabilan dunia dalam beberapa tahun mendatang, dengan akibat yang sangat besar bagi semua orang.

Hampir dua juta hektar lahan telah mengalami degradasi 50 tahun yang lalu; sekitar 180 juta hektar hutan telah dikonversi untuk keperluan lain selama dekade 80-an, perikanan laut di seluruh dunia hancur dan kekurangan air musiman dan secara regional menimpa beberapa negara sedang berkembang. Kebutuhan pangan di tahun 2020 dan setelahnya tidak dapat diproduksi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Pengembangan teknologi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas.

Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat berat sangat berpotensi untuk mengalami kerawanan pangan. Adanya musibah El-Nino dan dampak kebakaran lahan dan hutan yang berkepanjangan dapat menimbulkan ancaman kelaparan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Suatu ironi atas swasembada beras yang pernah dicapai oleh Indonesia di tahun 1984.

Menuju Ketahanan Pangan

Untuk mencapai pertanian yang tangguh diperlukan suatu visi yang merupakan kesepakatan bersama dan sebagai acuan dasar bagi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapainya. Dengan semakin terbukanya perdagangan dan perekonomian dunia, maka diperlukan visi yang bersifat global namun tetap mengacu pada kepentingan dan kemampu-an nasional agar mampu berperan dalam

kancah internasional. Dalam kaitan dengan pengembangan visi, *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) memperkenalkan "Visi 2020 untuk Pangan, Pertanian dan Lingkungan" sebagai berikut:
"Suatu dunia dimana setiap orang memiliki akses kepada kecukupan pangan untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan produktif, tidak ada malnutrisi, dan bahan pangan diperoleh dari efisiensi, efektifitas dan sistem pangan berbiaya rendah, yang sesuai dengan penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan".

. Visi di atas merupakan sebuah visi yang memiliki jangkauan sangat luas namun tetap terfokus karena menyangkut pemerataan kemampuan mengakses sumberdaya alam untuk pangan, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Akan tetapi, jika agribisnis yang dijalankan seperti yang selama ini dilakukan maka persoalan rawan pangan dan kekurangan gizi, khususnya pada anak-anak balita masih akan tetap mengkhawatirkan. Dengan sedikit menambah pengeluaran untuk penelitian pertanian, pemeliharaan kesehatan dasar, dan pendidikan dasar, manfaat gizi yang besar dapat diperoleh, yaitu mengurangi kekurangan gizi anak balita sekitar 100 juta anak di dunia hingga tahun 2020.

Sementara itu kemiskinan akan meluas di negara-negara yang sedang berkembang, dengan lebih dari 1,1 juta orang hidup dengan satu dollar atau kurang per hari per orang. Pengembangan sumberdaya manusia di negara yang sedang berkembang umumnya ketinggalan: satu juta orang kurang mendapatkan layanan kesehatan, 1,3 juta mengkonsumsi air tidak sehat, hampir dua juta tidak memiliki sistem sanitasi yang cukup, dan sepertiga dari anak sekolah dasar putus sekolah pada kelas 4. Hingga seperempat abad ke depan, jumlah penduduk dunia diproyeksikan meningkat sekitar 40% menjadi 8 miliar di tahun 2020 (Pinstrup-Andersen & Pandya-Lorch, 1998).

Sebagai hasil pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan, permintaan dunia terhadap serealia diperkirakan meningkat 56% antara 1990 dan 2020, dan untuk produk ternak meningkat 74%. Sumberdaya alam, tempat bergantung produksi makanan di masa depan, mengalami degradasi pada laju yang mengkhawatirkan.
Hampir dua juta hektar lahan telah mengalami degradasi 50 tahun yang lalu; sekitar 180 juta hektar hutan telah dikonversi untuk keperluan lain selama dekade 80-an, perikanan laut di seluruh dunia hancur dan kekurangan air musiman dan secara regional menimpa beberapa negara sedang berkembang. Kebutuhan pangan di tahun 2020 dan setelahnya tidak dapat diproduksi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Pengembangan teknologi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Akan tetapi kecilnya pendapatan dan dampak kekurangan pangan di negara yang sedang berkembang secara nyata menurunkan investasi pada penelitian pertanian.
Dengan mempertimbangkan gambaran umum kondisi pertanian dan kebutuhan pangan dunia tersebut, Indonesia harus dapat mengembangkan sebuah visi agribisnis yang tangguh sebagai poros roda penggerak perekonomian yang saat ini sangat rapuh. Visi pembangunan pertanian yang dikembangkan oleh Indonesia hendaknya berpusat pada pelaksanaan sebuah sistem agribisnis yang mengintegrasikan subsistem-subsistem budidaya, pengolahan dan pemasaran serta lembaga-lembaga penunjang lainnya dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya alam serta memungkinkan terjadinya pemerataan akses ke sumberdaya bagi semua orang, sehingga dimungkinkan adanya pemerataan pendapataan di antara subsistem-subsistem yang ada untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tinggi. Syarat utama keberhasilan pencapaian visi di atas adalah dibutuhkannya cara pandang yang integral dalam pembangunan pertanian yang berimplikasi pada perlunya institusi-institusi yang berinteraksi secara koordinatif dan koheren. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi Indonesia yang seringkali memiliki permasalahan dalam koordinasi terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. Oleh karena itu untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan tindakan berkelanjutan dalam enam area prioritas seperti dikemukakan di bawah ini.

Upaya-upaya dan kontribusi LSM dan elemen masyarakat madani lainnya harus secara penuh diakui dan didukung, sehingga tercipta pembagian pekerjaan yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintahan yang Kuat dan Mendukung

Kapasitas pemerintah Indonesia untuk melaksanakan fungsinya seperti pemantapan atau klarifikasi hak kepemilikan, memperbaiki persaingan sektor swasta dalam pasar pertanian, dan memelihara lingkungan makro-ekonomi yang kondusif harus diperkuat dan diupayakan lebih transparan. Kemampudugaan, transparansi dan keberlanjutan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya harus benar-benar dijalankan. Pemerintah harus berani melepaskan bisnis yang akan lebih baik jika ditangani pihak swasta atau kelompok masyarakat. Di beberapa negara, LSM telah memainkan peranan yang lebih penting di wilayah-wilayah yang secara tradisional dimainkan oleh pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, penanganan kesehatan, gizi dan manajemen sumberdaya alam. Upaya-upaya dan kontribusi LSM dan elemen masyarakat madani lainnya harus secara penuh diakui dan didukung, sehingga tercipta pembagian pekerjaan yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam situasi politik Indonesia saat ini dimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cenderung menurun, maka segala tindakan pemerintah untuk mengatasi krisis menjadi sorotan masyarakat. Upaya-upaya privatisasi BUMN yang bergerak di sektor agribisnis dan pembubaran praktek monopoli merupakan upaya nyata pemerintah disamping untuk meningkatkan efisiensi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akibat isu-isu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Investasi sumberdaya manusia

Perlu adanya investasi lebih besar lagi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan dan gizi mereka. Merupakan fenomena yang tidak adil, juga secara ekonomi adalah pemborosan, jika masih banyak penduduk di Indonesia mengalami kekurangan gizi, buta huruf, sakit dan tidak memiliki akses kepada sumberdaya. Akses kepada pendidikan dasar, perawatan kesehatan, perawatan reproduksi, informasi keluarga berencana dan air bersih serta sanitasi harus diberikan kepada semua orang. Akses masyarakat miskin ke sumberdaya produktif dan upah atas pekerjaan harus ditingkatkan. Dalam pada itu pemberdayaan wanita harus didukung, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya.

Pertanian dan Produktivitas

Indonesia harus memacu produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan mutu hasil panennya. Pertanian adalah urat nadi perekonomian Indonesia dan umumnya di negara yang sedang berkembang dengan pendapatan yang rendah. Terdapat keterkaitan yang kuat antara meningkatnya produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi berbasis perluasan yang bersandarkan pada ekonomi. Pertanian adalah mesin pertumbuhan pada negara-negara sedang berkembang. Sistem penelitian pertanian nasional dan internasional harus dimobilisasi untuk mengembangkan teknologi maju yang difokuskan pada penyebaran dan peningkatan teknologi dan rekayasa pertanian.

Program komoditas unggulan sebagai antisipasi krisis dan era perdagangan bebas harus berdasar pada keunggulan kompetitif dan keberlanjutan pasokan untuk masa mendatang. Kemungkinan diversifikasi menjadi produk-produk akhir yang memiliki nilai tambah yang tinggi juga perlu dijadikan pertimbangan untuk menentukan arah prioritas pengembangan agribisnis

Penelitian pertanian nasional harus dibantu dengan sebuah sistem penelitian pertanian internasional yang menyelenggarakan penelitian dengan manfaat internasional yang besar yang dapat diterapkan ke seluruh penjuru dunia, terlebih pada situasi moneter yang tidak mendukung seperti saat ini. Hal yang paling penting dari hasil penelitian pertanian adalah berkurangnya biaya per unit produksi. Pengurangan biaya seperti itu akan membuat pangan secara ekonomis dapat diakses oleh masyarakat kecil, dan memungkinkan peningkatan pendapatan produsen. Untuk memastikan relevansi penelitian dan distribusi tanggung jawab yang baik, interaksi antara sistem penelitian pertanian sektor publik, petani, perusahaan swasta, dan LSM harus ditingkatkan. Ilmu pengetahuan modern, termasuk penelitian rekayasa genetika dan bioteknologi harus digunakan untuk menyelesaikan masalah pertanian di Indonesia.

Di dalam praktek pengolahan hasil atau agroindustri, teknologi pertanian yang mengacu pada teknologi bersih dan peningkatan nilai tambah akan sangat mendukung pengembangan pertanian Indonesia di masa depan. Disamping itu dari aspek lingkungan, teknologi tersebut membantu perbaikan lingkungan yang sehat.

Program komoditas unggul-an sebagai antisipasi krisis dan era perdagangan bebas harus berdasar pada keunggulan kompetitif dan keberlanjutan pasokan untuk masa mendatang. Kemungkinan diversifi-kasi menjadi produk-produk akhir yang memiliki nilai tambah yang tinggi juga perlu dijadikan pertimbangan untuk menentukan arah prioritas pengembangan agribisnis. Dengan dipadu pertimbangan penguasaan dan kemungkinan pengembangan teknologi pertanian maka prioritas komoditas unggulan akan menjadi lebih terfokus.

Memastikan kelestarian

Kepastian kelestarian (*sustainability*) di dalam produksi pertanian dan manajemen sumberdaya alam harus dijamin dengan sistem yang baik. Para petani, masyarakat lokal, dan pemerintah harus dapat secara bersama-sama memantapkan dan memperkokoh sistem kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Juga untuk meningkatkan cara pengalokasian penggunaan air, untuk mengembalikan degradasi lahan yang telah terjadi, untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan memasyarakatkan program penanggulangan hama terpadu, dan untuk melaksanakan program penyuburan tanah terpadu di areal yang kurang subur. Investasi di areal yang marjinal, yaitu areal yang memiliki potensi pertanian, curah hujan yang rendah, dan tanah kritis harus ditingkatkan.

Kebanyakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tinggal di wilayah perdesaan, dan kebanyakan desa miskin berada di areal marjinal. Untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah 'minus' dan 'surplus' perlu dilakukan upaya-upaya konkret semacam investasi yang lebih diarahkan ke daerah yang 'minus' tersebut dan penyebarluasan kegiatan padat karya di lahan-lahan marjinal dan produktif.

Biaya pemasaran pangan

Biaya pemasaran pangan di Indonesia dan umumnya negara-negara sedang berkembang cukup tinggi. Disamping karena infrastruktur yang kurang memadai, areal yang luas dan jauhnya pusat-pusat pemasaran mengakibatkan transportasi menjadi mahal. Pasar pertanian yang efisien, efektif, dan berbiaya rendah harus dikembangkan untuk menurunkan biaya tersebut. Inefisiensi perusahaan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah harus dihilangkan; investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya perdesaan, harus dikembangkan; kebijakan dan kelembagaan skala besar, agen pasar modal yang intensif untuk kredit skala kecil harus difasilitasi; dan bantuan teknis untuk menciptakan dan memperkuat usaha kecil, dan usaha kecil perdesaan padat karya yang kompetitif harus disediakan.

Keberadaan terminal agribisnis agaknya patut dipertimbangkan keberadaanya karena akan sangat membantu para petani di tingkat *on-farm* untuk menikmati pendapatan yang lebih tinggi karena biaya pemasaran dapat ditekan. Persoalannya kemudian adalah pengelola harus mampu menghilangkan praktek-praktek percaloan yang akan mengakibatkan rantai proses menjadi panjang dan pada akhirnya terjadi inefisiensi dan *insecurity*.

Bantuan internasional untuk pembangunan

Dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan ini maka bantuan internasional sangat penting bagi pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai visi di atas. Beberapa tahun yang lalu negara-negara industri maju telah menyetujui untuk mengalokasikan sedikitnya 0,7% dari pendapatan nasional brutonya untuk bantuan internasional. Kebanyakan negara tersebut belum mampu mencapai atau mempertahankan targetnya. Negara-negara OECD secara keseluruhan telah mengurangi bantuan internasional selama 2-3 tahun terakhir, dan rata-rata kontribusi OECD saat ini sekitar 0,3% dari GNP. Bagi negara industri maju, tidak hanya perlu meningkatan jumlah bantuan hingga mencapai 0,7% dari GNP, tetapi juga harus memeratakan bantuannya untuk negara seluruh sedang berkembang (Pinstrup-Andersen & Pandya-Lorch, 1998).

Keberadaan lembaga keuangan dunia semisal IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) saat ini menjadi penting bagi Indonesia untuk mengembalikan kondisi perekonomian seperti semula. Untuk itu pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki akses internasional harus berupaya untuk meyakinkan mereka tentang keseriusan Indonesia mengatasi krisis, terutama melalui pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang masih sangat besar potensinya. Selain mencoba *lobby* internasional untuk mendapatkan dana internasional, Indonesia harus mencari langkah-langkah diversifikasi sumberdaya pendanaan eksternal melalui pasar modal komersial untuk membendung pelarian modal ke luar dan meningkatkan efektivitas bantuan yang diterimanya.

Memulai tindakan dari sekarang

Keberhasilan pencapaian visi tergantung pada tindakan yang diambil saat ini. Fokus yang tajam pada visi tersebut dan komitmen untuk melangkah ke depan akan membawa Indonesia mendekati pencapaian tujuan pembangunan pertanian tersebut. Mempertahankan bisnis pertanian seperti yang berlangsung saat ini sudah barang tentu akan membawa Indonesia pada kelaparan, kemiskinan dan degradasi lingkungan, dan merupakan katalisator bagi meningkatnya ketidakstabilan dunia. Visi Agribisnis Berwawasan Lingkungan menunjukkan bahwa dengan pandangan ke depan dan langkah yang tegas, Indonesia harus dapat 'menciptakan' Indonesia yang lebih baik untuk semua orang. Hal itu sangat mungkin direalisasikan karena sesungguhnya masyarakat Indonesia memiliki motivasi yang tinggi, cukup pengetahuan, keterampilan dan kapasitas untuk melakukan itu semua.

REFERENSI

Pinstrup-Andersen, P., and Pandya-Lorch, R. 1998. A 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment, in The World Development Aid: Joint Venture Finance 1998/99. Kensington Publications Ltd. in conjunction with the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Kompas, Sabtu 2 Mei 1998. Indonesia akan Defisit Produksi Padi Tahun 2010.